

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Buletin

Edisi: 02 / 2015

Tike Malaha

Membangun SDM dan Mempererat Silaturahmi

KOORDINASI DILKUMJAKPOL

PEMANFAATAN DESAIN INDUSTRI

BAGI PENGEMBANGAN UMKM

EKSISTENSI & STRATEGI SUB. BAGIAN HUMAS

PENJARA BUKAN SOLUSI

Stop HIV...!!

TIKET MENUJU UJIAN CAT

SINERGI "KUNCI SUKSES ORGANISASI"



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Buletin Tike Malaha Edisi ke II ini akhirnya terbit menyusul edisi sebelumnya tepat pada tahun lalu. Untuk tahun 2015 ini Buletin Tike Malaha akan rencana terbit sebanyak 4 (empat) kali yang berarti sampai Edisi ke V (lima).

Dalam edisi kali ini, Buletin Tike Malaha memuat beberapa artikel yang bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi tambahan pengetahuan untuk bisa dipahami. Dan untuk melengkapi informasi pembaca Buletin Tike Malaha juga menyajikan beberapa peristiwa penting tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara beserta beberapa satker yang ada pada jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara yang antara lain HUT Imigrasi ke 65 pada hari senin, 26 januari 2015.

Semoga kita selalu ingin berkarya dan segala yang telah kita kerjakan merupakan bimbingan yang lurus dari Yang Maha Kuasa, kami mengucapkan terima kasih atas aspirasi semua pihak dan tak lupa redaksi mengharap kritik dan saran demi kemajuan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.(MMM)

Tim Redaksi



DAFTAR ISI

LIPUTAN KANWIL

- 04 **Koordinasi DILKUMJAKPOL**
- 08 **ISA MUHAMMAD**
Sebagai Notaris Pengganti
- 09 **Pelantikan PPNS**
Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara
- 14 **Pelantikan PPNS & Notaris**
- 15 **Pelantikan**
Pejabat Struktural
- 19 **Rapat Persiapan Hari Dharma Karyadhika**
- 19 **Paguyuban PIPAS**
- 20 **Monitoring Di Rutan Klas IIB Soa-sio dan
Lapas Klas IIB Jailolo**
- 21 **Jalan Santai Dharma Karyadhika**
- 23 **Pelantikan Majelis Pengawas Notaris**
- 23 **Sosialisasi SPIP dan Pemanfaatan Anggaran
2015**
- 24 **Penjara Bukan Solusi**
- 25 **Puncak Hari Dharma Karyadhika**
- 27 **Berbagi Kasih dengan Anak Yatim**
- 28 **Forum Koordinasi Pimpinan Daerah**
- 29 **Live Streaming Bahaya HIV**
Stop HIV, "Jauhi Penyakitnya, Jangan Orangnya".
- 31 **Kabid INTELDAKIM dilantik**
- 32 **Sosialisasi HIV/AIDS dan IMS**
- 36 **Memperingati Hari AIDS Sedunia Tahun
2014**

SEPUTAR CPNS

- 10 **Rapat Persiapan**
Penerimaan CPNS.
- 11 **Tinggi & Berat Badan**
Salah Satu Tolok Ukur Lolos Verifikasi Berkas.
- 12 **Satu Tiket**
Menuju Ujian CAT
- 13 **Ujian CAT Berjalan Lancar**

ARTIKEL

- 06 **SINERGI**
"Kunci Sukses Organisasi"
- 16 **Eksistensi & Peran Strategis**
Sub. Bagian Humas dan Laporan
- 42 **Pemanfaatan Desain Industri Bagi
Pengembangan UMKM**
- 33 **Selayang Pandang**
Kantor Imigrasi Klas II Tobelo



Pelindung

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.Si

Penanggung Jawab

Kadiv Administrasi: Dra. Anita Nurlette, MH
Kadiv Yankum: Dra. M.J. Mataheru, MH
Kadiv PAS: Pargiyono, Bc.IP, SH., MH
Kadiv Imigrasi: Dodi Atmaja Halilintar

Redaktur

Kabag PPL: Ismail, SH., MH
Kasub. Bag. Humas & Laporan: M. M. Marasabessy, SH

Penyunting / Editor

Muhammad M. Marasabessy, SH

Redaksi Pelaksana

Sri Yanto, SE
Muhammad Iqbal, SE

Design Graphic

Sri Yanto, SE

Fotografer

Sri Yanto, SE
Muhammad Iqbal, SE

Sekretariat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
Jl. Cengkeh Afo, No 40 Batu Anteru
Ternate, Maluku Utara

Redaksi menerima sumbangan artikel, opini dan laporan kegiatan disertai foto pendukung.

Kirim artikel anda ke email kami di:
malut.kemenkumham@gmail.com



KOORDINASI DILKUMJAKPOL

Kepala Kantor Wilayah menyambangi Kepala Pengadilan Tinggi, Kapolda, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dalam rangka koordinasi DILKUM-JAKPOL

Ternate – Rapat Koordinasi antara Instansi penegak Hukum DILKUMJAKPOL (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Polisi) di Maluku Utara sudah dua tahun ini terhenti. Hal ini disebabkan minimnya anggaran di masing-masing instansi untuk melakukan kegiatan tahunan antar instansi penegak hukum.

Pada hari Senin, 29 September 2014, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.Si berinisiatif untuk melakukan koordinasi atas kelangsungan kegiatan tahunan antar instansi hukum di Maluku Utara ini. Pertama beliau berkunjung ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dilanjutkan ke Polda Maluku Utara dan terakhir bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.



DIRUANG KAPOLDA MALUKU UTARA
KAKANWIL DAN KAPOLDA
SEDANG ASYIK BERCERITA
MENGENAI DILKUMJAKPOL



Minimnya anggaran dimasing-masing instansi menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan DILKUMJAKPOL tahun ini

Hasil dari lawatannya, bahwa dari semua instansi mengatakan tidak ada pos anggaran untuk kegiatan tersebut. Untuk itu pada tahun ini kecil kemungkinan akan dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi DILKUMJAKPOL di Provinsi Maluku Utara. *(Humas Kanwil Malut)*



“SINERGI”

KUNCI SUKSES ORGANISASI

Oleh:

Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.Si

K

epemimpinan bagi semua manusia bukanlah pilihan, melainkan adalah kemestian. Setiap manusia dengan takdirnya telah diberikan amanah sebagai pemimpin. Seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya, seorang direktur perusahaan adalah pemimpin bagi staff dan karyawannya, seorang ketua organisasi adalah pemimpin bagi anggotanya, seorang guru adalah pemimpin bagi murid-muridnya, seorang ayah adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, bahkan setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri.

Seorang pemimpin lahir untuk masa depan yang lebih baik, dan dia memiliki anugerah untuk menjadi panutan bagi semua orang yang mempercayainya. Sinergi sebagai prinsip kepemimpinan akan menjadikan dia sebagai seorang pemimpin yang mampu memeluk erat - erat semua keragaman bersama semua kebaikan dalam satu fungsi yang menyatukan dia dengan semua orang yang dia pimpin dalam satu kekuatan besar yang optimal untuk menghasilkan kinerja terbaik kepemimpinannya.

Sering terdengar kata-kata Sinergi yang terlontar sengaja atau tidak sengaja dalam momen-momen kelompok, seperti Training and Motivation, Counseling, bahkan dalam sesi Meeting. Pembicara yang mungkin sebagai Top Management di wilayahnya atau mungkin seorang Manager dalam suatu Department, sering melontarkan kata “SINERGI” (Synergy). “Kita harus sinergi kalau ingin mencapai target”, “Kalau tidak sinergi bagaimana kita bisa achieve”. Itulah beberapa statement mengenai Sinergi yang terdengar dalam Meeting-meeting.

Definisi Sinergi

Sinergi (Synergy) adalah bentuk Kerjasama Win-win yang dihasilkan melalui Kolaborasi masing-masing Pihak tanpa adanya Perasaan Kalah. Menurut Stephen Covey dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective People, jika $1 + 1 = 3$, maka itulah yang disebut “Synergy”. Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai Hasil Lebih Besar daripada Jumlah bagian per bagian. Konsep ber-Sinergi diantaranya adalah berikut ini:

- Ber-Orientasi pada Hasil dan Positif
- Perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigma
- Saling Bekerjasama dan ber-Tujuan Sama serta adanya Kesepakatan
- Sangat Efektif diusahakan dan merupakan suatu Proses
- Melalui Sinergi, kerjasama dari Paradigma yang berbeda akan mewujudkan hasil Lebih Besar dan Efektif sehubungan Proses yang dijalani menunjukkan Tujuan yang Sama dan Kesepakatan demi Hasil Positif.

Ber-Sinergi berarti Saling Menghargai Perbedaan Ide, Pendapat dan bersedia saling berbagi. Ber-Sinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berpikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan. Ber-Sinergi bertujuan memadukan bagian-bagian terpisah.

Bagaimana Membangun Sinergi?

Sinergi adalah proses yang harus dilalui masing-masing pihak, yang mana perlu waktu dan konsistensi. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membangun Rasa Saling Percaya sehingga Sinergi terbangun sebagai Kerjasama Kreatif diantaranya:

- Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan orang lain
- Jangan menilai buruk terhadap pihak lain
- Jangan memberikan Janji yang Anda tak yakin memenuhinya
- Jangan mengecewakan harapan orang lain

Mewujudkan Sinergi adalah Keberhasilan Bersama yang terbina dari Kebiasaan. Mewujudkan Sinergi bukan berarti ber-Kompromi di tengah, melainkan mencari alternatif ketiga dan mencapai puncak. Sinergi adalah perbedaan bukan persamaan. Sinergi akan membangun Kerjasama-kerjasama Kreatif dengan cara menghormati perbedaan, membangun kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara merupakan organisasi atau institusi pemerintah yang ada di Maluku Utara selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, bahasa, latar belakang pendidikan juga keberagaman perilaku yang kesemuanya itu jika tidak disatukan, jika tidak saling bersinergi maka segala bentuk keberagaman tersebut bisa menjadi masalah yang serius sehingga visi maupun misi yang diemban Kantor Wilayah tidak akan bisa terwujud dengan baik. Alhasil pencitraan masyarakat terhadap Kanwil Hukum dan HAM akan menjadi buruk. Untuk itu, saya mengajak kepada semua pejabat maupun pegawai untuk saling bersinergi, bahu membahu, bergotong royong layaknya koloni semut, bersatu padu layaknya seikat sapu guna mewujudkan mimpi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara menjadi pioner atau contoh bagi SKPD yang ada di Maluku Utara.





ISA MUHAMMAD SEBAGAI NOTARIS PENGGANTI

PELANTIKAN

ISA MUHAMMAD

SEBAGAI

NOTARIS PENGGANTI

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.Si melantik Notaris Pengganti di Kota Ternate atas nama Isa Muhammad, SH pada hari Kamis, 21 Agustus 2014. Pada acara pelantikan tersebut hadir pula pejabat struktural eselon II, III, IV serta pegawai dilingkungan Kantor Wilayah dan juga tamu undangan.

Dalam sambutannya Kakanwil mengatakan bahwa, penunjukan Notaris pengganti untuk meneruskan tugas-tugas notaris yang menjalankan cuti sehingga tidak terjadi kevakuman. Oleh karenanya Notaris Pengganti mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan notaris pada umumnya, yaitu sebagai pejabat umum yang dalam pelaksanaan tugasnya harus selalu mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Jabatan Notaris. *(Humas Kanwil Malut)*





PPNS DISHUB HALUT DILANTIK



PPNS yang dilantik diharapkan dapat bertugas dalam penegakan hukum dan mengedepankan HAM

S

Selasa, 2 September 2014 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.Si mengambil sumpah dan pelantikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara atas nama Agustinus Letsoin, ST. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV serta pegawai di lingkungan Kanwil hukum dan HAM Maluku Utara. Selain itu hadir pula pejabat dari Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi serta pejabat dari Dinas Perhubungan Halmahera Utara.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya bahwa PPNS yang dilantik diharapkan dapat bertugas dalam penegakan hukum dan mengedepankan HAM yang sesuai dengan aturan hukum, jelas Kakanwil. Selain itu diharapkan dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan koordinator pengawas dari pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas di wilayah kerja masing-masing. (Humas Kanwil Malut)

RAPAT PERSIAPAN PENERIMAAN CPNS



Jangan ada yang bermain dibalik layar dan menjanjikan kelulusan

CPNS MASIH MENJADI

PEKERJAAN PRIMADONA

PILIHAN MASYARAKAT

Calon Pegawai Negeri Sipil atau biasa dikenal dengan CPNS merupakan pekerjaan yang paling banyak dicari dan diburu oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak diantara lulusan SMA, Diploma maupun Sarjana yang baru lulus atau bahkan orang yang sudah bekerja di lingkungan swasta pun juga ingin mencoba peruntungan untuk mengikuti tes CPNS. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara pada tahun ini mendapat jatah alokasi 3 formasi jabatan yakni Tenaga Pengamanan (Sipir), Tenaga Teknis Perawat dan Tenaga Teknis

Komputerisasi. Dari ketiga formasi tersebut total CPNS yang dibutuhkan sebanyak 31 orang.

Dalam rangka persiapan penerimaan CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, Panitia penyelenggara melaksanakan rapat persiapan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 bertempat di ruang rapat kakanwil.

Dalam rapat persiapan tersebut Kepala Kantor Wilayah Bapak Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.Si berpesan bahwa *“proses rekrutment Calon Pegawai Negeri Sipil saat ini sudah tidak sama seperti dulu lagi, jangan ada yang bermain dibalik layar alias panitia bayangan dan jangan pernah menjanjikan kelulusan kepada para*

peserta CPNS, ikuti aturan yang ada. Jika dikemudian hari saya temukan pelanggaran maka saya akan menindak tegas.” Ungkapnya.

Dalam rapat terbatas tersebut, dibacakan pembagian tugas pokok dan fungsi

Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara. (Humas Kanwil)





TINGGI & BERAT BADAN

SALAH SATU TOLOK UKUR LOLOS VERIFIKASI BERKAS

S

elang sehari setelah dilakukan pengumuman kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang lolos berkas maka pada hari Rabu, 1 Oktober 2014 bertempat di Aula Kantor Wilayah telah dilaksanakan pengukuran berat dan tinggi badan peserta Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta verifikasi berkas yang dikirim via pos dengan dokumen asli.

Dalam sambutannya Bapak Kakanwil Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.Si mengatakan bahwa Kantor Wilayah Maluku Utara pada tahun ini diberi kepercayaan oleh pusat dengan mendapat alokasi tambahan pegawai. Untuk itu diharapkan kepada panitia agar bekerja sesuai aturan yang berlaku dan ucapan selamat kepada putra putri daerah Maluku Utara untuk terus berkompetisi dalam proses rekrutmen CPNS di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut.

Selain itu Pengawas Ombudsman Sofyan Ali beserta tim hadir pula pada saat pengukuran berat dan tinggi badan serta verifikasi dokumen asli. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah salah satu kementerian yang sudah menerapkan reformasi birokrasi dalam hal perekrutan CPNS, hal ini dibuktikan dengan melibatkan Ombudsman sebagai lembaga independen yang mengawasi instansi pemerintah sebagai pelayan publik. Selain itu menurut beliau juga mengatakan bahwa LSM dan Perguruan Tinggi setempat juga ikut dilibatkan dalam hal pengawasan rekrutmen pegawai.

Peserta CPNS yang mengikuti pengukuran berat dan tinggi badan sebanyak 39 orang. Dari calon peserta tersebut hadir sebanyak 38 orang peserta. Yang dinyatakan lolos pengukuran berat dan tinggi badan serta verifikasi sebanyak 26 orang dan yang dinyatakan gugur sebanyak 13 orang. (Humas Kanwil)



SATU TIKET MENUJU UJIAN CAT

PARA PESERTA CPNS BERJUANG

DEMI LOLOS KE TAHAP UJIAN CAT

Dengan kuota Penerimaan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara sebanyak 31 peserta, ternyata sampai pada tahap seleksi samapta hanya tersisa sebanyak 26 peserta saja. Hal ini disebabkan minimnya minat masyarakat yang mengikuti seleksi CPNS. Selain itu, jenjang pendidikan yang dibutuhkan adalah Diploma III (DIII) sehingga peserta dengan jenjang pendidikan SMU sederajat tidak bisa mengikuti seleksi CPNS.

Seleksi Ujian Samapta sendiri dilaksanakan di Gelora Kie Raha pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014. Adapun penugji dalam seleksi ujian samapta Kantor Wilayah bekerja sama dengan pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara, sedangkan pengawas seleksi melibatkan pihak Ombudsman sebagai lembaga independen pemerintah bidang pengawasan pelayanan publik.

Dari 26 peserta CPNS yang mengikuti Seleksi Ujian Samapta, pihak POLDA Maluku Utara mengatakan bahwa semuanya memenuhi syarat untuk bisa mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Artinya dari semua peserta ujian samapta sebanyak 26 orang, semuanya lulus. *(Humas Kanwil Malut)*





UJIAN CAT BERJALAN LANCAR

P

elaksanaan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam 2 (dua) tahun terakhir benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya, pasalnya ujian kali ini menggunakan CAT (Computer Assisted Test) yakni pelaksanaan ujian dengan tidak

menggunakan LJK (Lembar Jawab Komputer) melainkan dengan menggunakan komputer secara langsung. Sistem ini disambut baik oleh seluruh kalangan masyarakat, mengingat dengan sistem yang baru ini dapat meminimalisir terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) antar peserta ujian CPNS. Ujian dengan menggunakan Sistem CAT memang lebih baik jika dibandingkan dengan ujian dengan menggunakan LJK karena peserta CPNS yang mengikuti ujian bisa langsung mengetahui nilainya masing-masing namun bagi peserta yang kurang paham dengan pengoperasian komputer, maka sistem ini dirasa kurang cocok.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara pada tahun ini telah menggunakan sistem CAT dalam proses perekrutan CPNS. Dari 31 formasi jabatan yang dibutuhkan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, peserta yang mengikuti seleksi CPNS hanya sebanyak 39 orang. Setelah mengikuti seleksi administrasi maupun kesehatan dan kesamaptaan maka peserta yang lolos untuk mengikuti ujian CAT hanya 26 peserta. Dari

26 peserta tersebut semuanya hadir untuk mengikuti pelaksanaan ujian CAT yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014 bertempat di Laboratorium Komputer Universitas hairun Ternate yang dihadiri langsung oleh Tim dari BKN (Badan Kepegawaian Nasional serta di awasi langsung oleh Lembaga Pemerintah Ombudsman.

Sebelum pelaksanaan ujian dimulai, Kepala Kantor Wilayah Bapak Agus Rawan mengatakan bahwa Staf maupun Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara tidak ada yang menjanjikan kelulusan bagi para peserta ujian. Perekrutan pegawai dengan menggunakan sistem CAT ini sangat menguntungkan kalian karena tidak ada lagi namanya KKN dalam proses perekrutan CPNS, maka dari itu silahkan berlomba-lomba, gunakan kemampuan maksimal anda agar bisa lulus menjadi CPNS dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara.

Pelaksanaan ujian berjalan lancar dan hanya berlangsung selama 1 (satu) hari mengingat peserta ujian CPNS hanya 26 orang. Untuk siapa yang lulus dan tidaknya peserta ujian CPNS maka kita menunggu keputusan dari pusat. (Humas Kanwil Maluku)



PELANTIKAN PPNS DAN NOTARIS

P

ada hari Kamis, 16 Oktober 2014 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.Si telah melantik Pejabat Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate atas nama Musli Muhamad, ST., M.Eng serta melantik Notaris Kabupaten Halmahera Barat atas nama Husen Ikram Al-Ammary, SH., M.Kn. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Pejabat Struktural Eselon II, III, IV serta pegawai jajaran Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara, selain itu hadir pula Pejabat dari Instansi terkait serta Satpol PP.

Dalam sambutannya kakanwil berpesan bahwa seorang notaris, sekalipun telah memiliki keterampilan teknis kenotariatan yang cukup akan tetapi bila tidak dilandasi oleh tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran dari martabat jabatan serta nilai-nilai etika yang ada maka mustahil terwujud apa yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan selalu berkoordinasi dengan MPD selaku pembina dan pengawas notaris. Mengakhiri sambutannya Kakanwil mengingatkan PPNS dan notaris untuk berhati-hati dan teliti dalam bekerja dan tidak melakukan pelanggaran kode etik apalagi melakukan tindak pidana yang dapat merendahkan martabat jabatan. (Humas Kanwil Maluku)





R

rotasi pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara kembali bergulir pada Triwulan IV Tahun 2014 ini. Bertempat di Aula Kantor Wilayah, Senin, 27 Oktober 2014, Kakanwil melantik tiga pejabat struktural Jajaran Kemenkumham Malut. Kali ini pejabat

yang dirotasi atau pemindahan adalah Kepala Divisi Pemasarakatan yang sebelumnya dijabat oleh Molyanto, Bc.IP, SH digantikan Pargiyono, Bc.IP, SH, MH.

Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Ternate juga turut mengalami rotasi. Edy Mansah, SH selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Ternate sebelumnya digantikan oleh Drs. Dawai yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Banjarmasin. Selain dua pejabat diatas, Kepala Sub Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Kasubid Inteldakim) yang sebelumnya belum terisi, pada hari yang sama Jojo Suparjo, S.Sos, MH.

Kepala Kantor Wilayah bapak Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa rotasi jabatan adalah hal biasa dan lumrah yang terjadi disetiap instansi. Rotasi jabatan ini dianggap sebagai promosi juga untuk penyegaran terhadap jabatan yang sebelumnya diemban. Pesan beliau, kepada pejabat dilantik adalah agar bekerja dengan keras, cerdas dan ikhlas agar Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menjadi lebih baik lagi. (Humas Kanwil Malut)

PELANTIKAN

PEJABAT STRUKTURAL

JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM

MALUKU UTARA



EKSISTENSI DAN PERAN STRATEGIS BAGIAN HUMAS DAN LAPORAN PADA INSTANSI PEMERINTAH (KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I. KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA)

Oleh : Muh. M. Marasabessy, SH
(Kasubag Humas dan Laporan Kanwil Kemenkumham Malut)

Saat ini informasi telah menjadi kekuatan dominan yang bisa meruntuhkan keamanan dan kestabilan pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah/ badan publik, karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Dengan haknya tersebut, masyarakat bisa dengan mudah bertindak dan berprasangka negatif jika komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik. Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia sekarang ini, maka dituntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma sistem pemerintahan yang mengarah pada "Good Governance and Clean Governance". Merujuk pada perkembangan kebijakan pemerintahan yang tersebut, tampaknya merupakan sebuah penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik dan bersih, sekarang dituntut untuk mulai mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, accountable dan transparan. Instansi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, mulai menyadari bahwa untuk membangun pemerintahan yang sehat dan bersih diperlukan banyaknya kritikan dan pendapat pihak lain atau pendapat publik.

Dengan demikian maka yang menjadi pemeran dalam menggerakkan arah dan kebijakan teknis/ non teknis tersebut adalah salah satu bagian dari tugas kehumasan dalam satu instansi pemerintah, yang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pelayanan informasi institusi. Meliputi perencanaan pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personal. Terdapat beberapa jenis pelayanan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang apabila diposisikan pada Public Relation (kehumasan) antara lain ;

- Fungsi pengkajian, bagian kehumasan dapat melakukan penelaahan opini publik yang berpengaruh kepada lembaga/ institusi. Termasuk tekanan-tekanan yang bersifat sosio politik atau berpengaruh langsung dan kemudian melakukan cegah tangkal melalui komunikasi dan koordinasi;

- Fungsi promosi, tugas bagian kehumasan juga mempromosikan setiap kegiatan institusi. Disini dibutuhkan kreatifitas, inovasi dan keuletan dari personil untuk mempromosikan lembaga/ institusi kepada publik.
- Fungsi nasehat, Bagian humas dapat memberikan nasehat kepada pimpinan lembaga/ institusi maupun kepada bagian lain, berkaitan dengan operasionalisasi ketika terjadi sebuah masalah ataupun kebijakan teknis.
- Fungsi pelayanan komunikasi, yakni mengkomunikasikan informasi mengenai lembaga/ institusi dan segala kegiatannya kepada berbagai publik yang berkepentingan, berupa penyediaan layanan untuk dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan melalui media yang tepat. Ini merupakan kegiatan yang berupaya membuat publik tahu dengan berbagai cara yang pantas dan dapat di pertanggungjawabkan.

TANGGUNG JAWAB BAGIAN KEHUMASAN

Seiring perkembangan arus reformasi birokrasi dan era keterbukaan informasi publik, peran kehumasan semakin penting dan strategis. Sebagai komunikator publik, harus mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan dan menyebarkan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program kerja lembaganya. Humas sebagai penyampai informasi kepada masyarakat haruslah bisa menjadi sumber informasi resmi pemerintah yang dapat menyampaikan program pemerintah dan pembangunan yang telah, akan dan nanti dilaksanakan, agar bisa tersampaikan kepada masyarakat. Dan sebagai pemberi informasi harus selangkah lebih maju dengan yang akan mencari informasi.

Pada prinsipnya bagian Humas Pemerintah dituntut untuk mampu mengemas agenda setting kebijakan institusi, untuk disampaikan ke media sebagai agenda setting media dan diterima oleh publik sebagai agenda settingnya publik atau masyarakat. Melalui penciptaan agenda setting maka

Jadi bukan hanya menyiapkan tempat acara peliputan dan mendampingi pimpinannya kemana pergi saja, namun dituntut juga harus mampu mengemas agenda setting. Selain sebagai komunikator, juga bertindak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publik, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam mengawal perjalanan pelaksanaan kegiatan, tugas pokok dan fungsi yang ada dalam sebuah institusi/lembaga, serta mampu memelihara nama baik. Mampu melakukan pelayanan yang memadai, mampu menjalankan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan informasi.

Dalam mengelola informasi, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Ada informasi yang tidak boleh disampaikan kepada publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya :

1. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
8. Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi
9. Memorandum atau surat antar badan publik dan
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya, bagian Humas harus selalu terus diberikan dukungan dan sokongan oleh semua pihak khususnya dalam internal lingkup kerjanya supaya selalu bersinergi dan berkoordinasi untuk membangun citra institusi secara keseluruhan. Sinergitas perlu dibangun dalam hal pendistribusian informasi-informasi melalui potensi media yang sesuai dengan sifat-sifat demografis publik/masyarakat dengan melakukan aktivitas nyata dan membangun mekanisme aliran potensi informasi yang ada.

Eksistensi Humas harus menjalankan tugas secara profesional seperti memahami cara berkomunikasi yang baik, memahami budaya birokrasi dan memahami adat istiadat masyarakat setempat sehingga pesan atau informasi yang dibutuhkan publik dapat disediakan atau tersampaikan dengan baik serta citra positif pemerintah secara keseluruhan dapat terwujud.

Setiap orang yang menjalankan kehumasan tidak hanya berperan sebagai komunikator, namun juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, dikarenakan haruslah mengetahui dan memahami pendapat publik terhadap organisasi/institusi. Tak jarang mereka harus mendengarkan opini yang berbeda-beda, dikarenakan publik yang ditangani berbeda dan setiap individu memiliki tanggapan dan sikap yang berbeda pula. Perilaku sebagai cerminan aktualisasi dari visi pemimpin organisasi yang terintegrasi dengan misi dan rencana strategis lembaga/institusi itu sendiri.

HUMAS DAN LAPORAN KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

Kementerian Hukum dan HAM RI dalam bentuk nomenklatur dan desain struktur organisasi yang ada memanglah agak berbeda dengan Kementerian/ Lembaga lain dalam posisi pengembangan tugas pokok dan fungsi merupakan keunikan tersendiri, sebagai salah satu kementerian yang besar untuk ukuran porsi sebuah organisasi pemerintahan dalam melakukan pelayanan publik. Selain tugas pokok bidang kehumasan (publik relations) yang ada pada kantor wilayah seperti halnya dengan Kantor Wilayah di Daerah lainnya Kantor Wilayah Maluku Utara juga disatukan dengan tugas pokok dalam pembuatan/penyusunan laporan, yang kemudian disebutkan dengan nama Bagian Humas dan Laporan di bawah Bagian Perencanaan Program dan Laporan Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Tugas pokok dan beban pekerjaan yang ada di bagian kehumasan Kantor Wilayah Maluku Utara, mungkin agak berbeda dengan Daerah/Wilayah lain apabila dilihat dari kondisi demografi dan geografi yakni berada terletak di bagian timur, yang dikenal dengan Daerah Kepulauan dengan dipisahkan oleh jarak tempuh transportasi laut yang mencapai sehari perjalanan lebih antar kabupaten/ kota. Namun yang demikian bukan merupakan halangan dan hambatan akan tetapi tantangan tersendiri yang membutuhkan kesabaran, kerja keras dan kemauan yang tinggi untuk terus maju dan mempunyai sumber daya manusia yang dapat bersaing secara profesional.

Informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

UU KIP sejatinya membantu terwujudnya komitmen pemerintahan terhadap penyelenggaraan good governance and clean governance. Dengan demikian, secara filosofis keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Badan publik, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik.

Badan publik juga harus menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Selain itu badan publik juga harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien.

Humas Kanwil Kemenkumham Maluku Utara mempunyai peranan penting dalam menjaga mekanisme komunikasi Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan stakeholder lain tetap terjaga, sehingga kebijakan dan program pembangunan akan lebih tepat sasaran.



Eksistensi Sub. Bagian Humas dan Pelaporan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara mempunyai peranan penting antara lain adalah ;

1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, khususnya dari aspek hubungan dan komunikasi antara Pemerintah dengan Masyarakat luas.

2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja kanwil Kemenkumham, baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen.

3. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan integritas dan sinergi pembangunan dari masyarakat dengan Pemerintah melalui berbagai media.

4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta system kerja yang optimal, koordinatif, dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.

5. Sebagai Pusat Penyebarluasan informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring informasi baik untuk dipublikasikan mau-

pun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.

RAPAT PERSIAPAN HARI DHARMA KARYADHIKA

Berempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah para pejabat struktural di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara melaksanakan Rapat persiapan dalam rangka menyambut semarak hari Dharma Karyadhika.

Kemeriahan Hari Dharma Karya Dhika Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara kembali digaungkan yakni dengan direncanakannya beragam kegiatan yang telah disiapkan oleh panitia. Panitia Hari Ulang Tahun Dharma Karyadhika memanfaatkan momen setahun sekali ini untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga pengayoman.

Adapun kegiatan perlombaan yang dipersiapkan untuk pegawai jajaran Kanwil Kemenkumham Malut antara lain Tenis Meja, Gapple (Domino), Volly Ball dan Badminton. Selain jenis



perlombaan untuk pegawai terdapat juga lomba untuk keluarga pengayoman yakni Lomba Balap Kelereng, Balap Karung, Memecahkan Balon serta Jalan Santa. Puncak kemeriaannya adalah dengan pembagian doorprize kepada peserta jalan santai. (Humas Kanwil Malut)

PAGUYUBAN PERSATUAN IBU-IBU PEMASYARAKATAN



Selang beberapa jam setelah pelantikan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.Si di dampingi oleh Kadiv PAS yang baru Pargiyono, Bc.IP, SH., MH serta Kadiv PAS Lama Molyanto, Bc.IP, SH hadir dalam arisan paguyuban Persatuan Ibu-ibu Pemasarakatan (PIPAS) di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Ternate.

Dalam acara tersebut Kepala Divisi Pemasarakatan di dampingi ibu menyempatkan diri untuk berkenalan dengan Anggota PIPAS Kanwil kemenkumham Malut. Selain itu Kepala Divisi Pemasarakatan yang lama Bapak Molyanto, Bc.IP, SH didampingi istri menyampaikan salam perpisahan karena akan bertugas ditempat yang baru yakni di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. (Humas Kanwil Malut)

MONITORING KE RUTAN KLAS IIB SOASIO DAN LAPAS KLAS IIB JAILOLO



Monitoring adalah suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memantau dan mengawasi proses dan perkembangan pelaksanaan suatu program meliputi memeriksa dan mencatat.

Semua Program Kerja yang dilakukan oleh pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat baik dari sisi output maupun outcomenya sehingga dengan adanya evaluasi terhadap perencanaan anggaran dan laporan tersebut, kualitas penganggaran bisa diketahui.

Guna memperoleh informasi mengenai kedua hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara melakukan laporan monitoring perencanaan anggaran dan laporan pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Soasio Senin, 8 September 2014 serta Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Jailolo pada Selasa, 16 September 2014. Sedangkan

Dengan monitoring ini diharapkan dapat menjadi informasi awal mengenai kondisi perencanaan dan pelaporan Unit Pelaksana Teknis tersebut sehingga dapat dijadikan input untuk menyempurnakan kebijakan penganggaran dan pelaporan dengan tujuan mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar melakukan penyerapan anggaran secara optimal dengan kualitas belanja yang lebih baik. *(Humas Kanwil)*



JALAN SANTAI

RATUSAN PESERTA PADATI JALAN DEPAN KANTOR IMIGRASI KLAS I TERNATE



agung untuk memeriahkan Hari Ulang tahun Dharma Karyadhika atau Ulang Tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia begitu terasa. Peralnya, berbagai agenda perlombaan telah dilaksanakan untuk menyambut hari yang berbahagia tersebut. Mulai dari Tenis Meja Tunggal maupun Ganda, Lomba Gable atau Domino, Lomba Bulutangkis dan terakhir adalah Jalan Santai keluarga pengayoman.

Pada hari Minggu, 26 Oktober 2014 semua pegawai beserta keluarga mulai dari balita, anak-anak, remaja, hingga

orang dewasa memenuhi halaman Kantor Imigrasi Klas I Ternate sejak pukul 06.00 pagi Waktu Indonesia Timur untuk mengikuti acara jalan santai.

Hampir semua pejabat jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara turut hadir untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Bahkan Satker luar daerah seperti Rumah Tahanan Negara Klas IIB Soasio serta Lapas Klas IIB Jailolo turut hadir dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Dharma Karyadhika.

Acara ini, selain untuk kemeriahan HUT Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga sebagai ajang untuk meningkatkan silaturahmi diantara keluarga pengayoman secara keseluruhan.

Pada acara jalan santai tersebut, juga dilaksanakan berbagai kegiatan lomba untuk anak-anak keluarga pengayoman meliputi Lomba Kelereng, Lari Karung, Memecahkan Balon, serta pembagian Door Prize bagi peserta jalan santai yang diikuti sekitar 300 peserta. (Humas Kanwil Malut)



PELANTIKAN MAJELIS PENGAWASNOTARIS

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.Si melantik enam Anggota Majelis Notaris (MPN) pada hari Kamis, 9 Oktober 2014 bertempat di Aula Kantor Wilayah.

Dalam pidato sambutannya, beliau berpesan agar anggota MPN tidak memposisikan sebagai lembaga yang berpihak pada notaris serta melindungi notaris nakal. Notaris harus memposisikan diri sebagai supporting agency dalam mewujudkan ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Karena itu, lanjut Andi, putusan yang ditelurkan MPN harus melahirkan efek jera dan mendidik. MPN juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kepatuhan notaris untuk melaksanakan UU Jabatan Notaris No.36/2004 serta kode etik notaris dan peraturan perundang-undangan lain. Sehingga MPN bisa menjaga kehormatan, harkat dan martabat profesi notaris. (Humas Kanwil Malut)



SOSIALISASI SPIP DAN PEMANTAPAN ANGGARAN 2015



Pemerintah sebagai penyelenggara negara diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien serta akuntabel. SPIP atau Sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya bisa mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebagai Instansi Vertikal perpanjangan tangan dari Kemenkumham RI berupaya untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, baik dan benar. Untuk itu pada hari Jum'at, 31 Oktober 2014 bertempat di Aula Kantor Wilayah telah dilaksanakan Sosialisasi SPIP kepada para pejabat struktural di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara. Selain itu, pada hari yang sama juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemantapan Anggaran Tahun 2015. (Humas Kanwil Malut)



PENJARA BUKAN SOLUSI

“

Penjara tidak memberi efek jera bagi para pengguna.

B

adan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara beserta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, Kejaksaan, Polda Maluku Utara serta LSM pada hari Rabu, 5 Nopember 2014 melaksanakan Bimbingan Teknis Persiapan Pilot Project Pelaksanaan Assesment Terpadu dan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Hukum di Maluku Utara. Hal ini selaras dengan Deklarasi Penetapan Pilot Project oleh mantan Menkumham Amir Syamsudin di Graha Pengayoman Sekretariat Jenderal pada Selasa, 26 agustus 2014.

Program ini, memberi keringanan bagi para pengguna yang tertangkap. Proses penanganan mereka (para pengguna) tidak lagi dilakukan polisi. Bahkan, bebas dari jeruji besi. Alasannya, penjara tidak memberi efek jera bagi para pengguna. Justru semakin parah, dan menyebarkan pengaruhnya kepada rekan-rekannya yang lain.

Program khusus penanganan pengguna narkoba ini, merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi. Peraturan bersama itu, ditandatangani pada 16 April lalu oleh BNN, Mahkamah Agung, Kemenkum HAM, Polri, Kementerian Kesehatan, dan Kemensos.

Peraturan bersama itu dilatarbelakangi ketidakefektifan penanganan yang dilakukan polisi terhadap para pengguna narkoba dengan cara menjebloskannya ke dalam tahanan. Bahkan, di penjara, mereka bertemu dengan pengedar, bandar dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya, setelah bebas bukan malah berhenti tapi malah semakin parah. (Humas Kanwil Malut)



PUNCAK HUT DHARMA KARYADHIKA



anggal 30 Oktober merupakan hari besar bagi jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atau yang biasa dikenal dengan Hari Ulang Tahun Dharma Karyadhika. Pada hari Kamis, 30 Oktober 2014 bertempat di Lapangan Upacara Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Ternate, telah dilaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Dharma Karyadhika. Selain itu, pada kesempatan yang sama Kakanwil Drs. Agus Rawan, SH., MM.,M.Si juga menyematkan Penghargaan Satyalencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahu kepada pegawai atas pengabdianya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Struktural Eselon II, III, IV serta pegawai jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Selain itu Dharma Wanita Pengayoman juga notaris kota ternate turut hadir dalam upacara tersebut.

Pada hari yang sama juga dilaksanakan acara ramah tamah di Aula Lapas Klas IIA Ternate sekaligus pembagian hadiah kepada para pemenang peserta lomba Hari Dharma Karyadhika. (Humas Kanwil Malut)







BERBAGI KASIH

DENGAN ANAK YATIM

Menyambut Hari Ulang Tahun Dharma Karyadhika Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Panitia Penyelenggara telah melaksanakan berbagai macam kegiatan guna membangun silaturahmi kepada para pegawai dan keluarga pengoyamon. Tidak hanya sampai disitu saja, Panitia Penyelenggara juga berbagi kasih dengan 2 (dua) lembaga sosial atau Panti Asuhan yang dikelola ooleh Swasta di Kota Ternate yakni Yayasan Al-Yatama dan Yayasan Nurani Qalbi.

Kakanwil Kemenkumham Maluku Utara Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.S mengungkapkan bahwa, sebagian pendapatan yang kita peroleh dari pekerjaan kita sehari-hari sebenarnya terdapat jatah anak yatim. Untuk itu dihari yang berbahagia ini, Kamis, 30 Oktober 2014, Pegawai jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut berbagi kasih dengan anak yatim piatu. (Humas Kanwil Malut)





Meningkatkan koordinasi antara Pemda Prov/ Kab/ Kota dengan Intansi Vertikal."

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

SE - PROVINSI MALUKU UTARA

P

emerintah memiliki peran yang sangat kuat dalam menjaga kepentingan nasional dan Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk menjamin bahwa kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara efektif diseluruh wilayah Indonesia. Oleh

karena itu penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria tertentu dalam menjalankan wewenang pemerintah pusat.

Gubernur selaku kepala daerah berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi yang mempunyai fungsi menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Gubernur sebagai wakil pemerintah melaksanakan urusan pemerintahan meliputi (1) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan Instansi Vertikal di daerah; (2) Koordinasi dengan pemerintah daerah Kab/ Kota; (3) Koordinasi dengan pemerintah daerah lain; (4) Koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian RKPd, RPJMD serta RPJMN dan sebagainya.

Maksud dan tujuan forum komunikasi tersebut adalah untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah provinsi dan kab/kota serta instansi vertikal terkait dengan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melakukan sinergitas dan sinkronisasi berbagai kegiatan antara pemerintah

provinsi dan instansi vertikal sebagai upaya penanganan terhadap masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, untuk itu pada kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.Si hadir dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Se-Maluku Utara yang dilaksanakan di Ballroom Gamalama Bella International Hotel Ternate. (Humas Kanwil Malut)





LIVE STREAMING

BAHAYA HIV DI RRI

STOP HIV ...!!!

Jauhi Penyakitnya, Jangan Orangnya”



uman Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah dua hal yang berbeda, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sedangkan AIDS muncul setelah Virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh manusia selama lima hingga sepuluh tahun atau lebih. Karena lemahnya sistem kekebalan tubuh akibat terserang virus HIV tadi, maka beberapa penyakit bisa menjadi lebih berat dari biasanya.

Sistem kekebalan tubuh kita bertugas untuk melindungi kita dari penyakit apa pun yang setiap hari menyerang kita. Antibodi adalah protein yang dibuat oleh sistem kekebalan tubuh ketika benda asing ditemukan di tubuh manusia. Bersama dengan bagian sistem kekebalan tubuh yang lain, antibodi bekerja untuk menghancurkan penyebab penyakit, yaitu bakteri, jamur, virus, dan parasit. Sistem kekebalan tubuh kita membuat antibodi yang berbedabeda sesuai dengan kuman yang dilawannya. Ada antibodi khusus untuk semua penyakit, termasuk HIV. Antibodi khusus HIV inilah yang terdeteksi keberadaannya ketika hasil tes HIV kita dinyatakan positif. Itulah sepenggal penjelasan yang disampaikan oleh dr. Eko selaku Ketua Pokja HIV dan AIDS di Klinik Jasmin RS. Chasan Boesoerie Ternate pada saat Live Streaming Bahaya HIV dan AIDS yang dilaksanakan di Radio Republik Indonesia (RRI) Cabang Ternate pada Senin tanggal 24 Nopember 2014 pukul 20.30 WIT. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan RRI Cabang Ternate dalam rangka menyambut Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2014.

K

epala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.Si yang juga sebagai narasumber mengatakan bahwa “setiap orang yang terlahir didunia memiliki hak yang melekat pada diri seseorang sejak lahir sampai ia meninggal. Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak melanggar norma dan tata nilai dalam masyarakat. Hak asasi ini sangat wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Setiap orang sebagai harkat dan martabat manusia yang sama antara satu orang dengan lainnya yang benar-benar wajib untuk dilindungi dan tidak ada pembeda hak antara orang satu dengan yang lainnya. Saat ini muncul beragam stigma pada masyarakat terhadap penderita HIV dan AIDS. ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) adalah orang dengan komplikasi berbagai penyakit yang timbul karena melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Apabila masyarakat memiliki pandangan sebelah mata kepada ODHA misal “kalau terlalu dekat sama dia ntar bisa kena keringanya jadinya ketularan loh, atau jangan makan memakai alat makan yang dia pakai ntar ketularan juga dan lain sebagainya”. Jika masyarakat memandang sebelah mata terhadap ODHA seperti ini, maka si ODHA ini berpikiran kalau dia dikucilkan dari masyarakat, pada akhirnya semangat hidup si ODHA akan berkurang sehingga dengan komplikasi penyakit yang diderita dan perasaan dikucilkan oleh masyarakat bisa menambah pelik terhadap beban hidup yang dihadapi. Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak mengucilkan atau mendiskriminasi ODHA sehingga ia memiliki semangat dan harapan hidup kembali”.

S

elain kedua narasumber tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Prov Maluku Utara dr. Idhar Sidi Umar, M.Kes juga hadir menyampaikan materi tentang “Gambaran Kondisi HIV dan AIDS Di Maluku Utara”. Beliau mengatakan “Statistik penderita HIV dan AIDS yang dilaporkan sampai pada Juni 2014 bahwa Prov. Maluku Utara menduduki rangking ke-29 secara nasional yakni untuk HIV terdapat 247 kasus sedangkan AIDS terdapat 165 kasus”.

U

ntuk Maluku Utara sendiri, kasus penderita HIV AIDS terbesar yakni di Kota Ternate dengan total 177 kasus, kedua adalah Kab. Halmahera Utara sebanyak 95 kasus, ketiga adalah Kab. Halmahera Barat sebanyak 21 kasus, ke empat adalah Kota Tidore Kepulauan sebanyak 17 kasus, kelima dan ke enam adalah Kab. Halmahera Selatan dan Kab. Kepulauan Sula masing-masing sebanyak 15 kasus, ke tujuh adalah Kab. Halmahera Timur dengan 13 kasus, ke delapan adalah Kab. Pulau Morotai

dengan 5 kasus, ke sembilan adalah Kab. Halmahera Tengah sebanyak 2 kasus, sedangkan Kab. Pulau Taliabu adalah nihil. Jadi total penderita HIV dan AIDS di Provinsi Maluku Utara sampai Maret 2014 adalah sebanyak 360 kasus.

Menurut WHO, jika suatu daerah terdeteksi 1 orang penderita HIV AIDS maka terdapat 100 orang yang belum terdeteksi Virus HIV. Jika penderita HIV AIDS di Maluku utara saat ini adalah sebanyak 360 kasus maka terdapat 36.000 kasus yang belum terdeteksi dengan jumlah penduduk Prov. Maluku Utara sebanyak 1.165.308 Jiwa. Untuk itu, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan KPA Prov. Maluku Utara dalam rangka menekan jumlah penderita HIV AIDS antara lain:

1. Sosialisasi pada kelompok berisiko
2. Pengadaan media KIE
3. Pelatihan petugas konselor
4. Pemeriksaan HIV statis dan Mobile
5. Penjangkauan Populasi kunci dan populasi umum
6. Pendampingan bagi ODHA
7. Pembentukan Outlet kondom
8. Distribusi kondom
9. Set up Layanan
10. Rapat koordinasi lintas sektor
11. Evaluasi dan bimtek
12. Advokasi pembentukan KPA Kab/Kota
13. Peringatan HAS 1 Desember

K

akanwil Kemenkumham Maluku Utara menambahkan bahwa harus ada regulasi resmi dari pemerintah daerah terkait dalam hal menekan laju pertumbuhan penderita HIV AIDS di Maluku Utara, untuk itu beliau berharap kepada SKPD terkait atau pemda jika sudah memiliki draft tentang HIV AIDS untuk dapat bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dalam rangka harmonisasi produk hukum, karena kami telah memiliki sekitar 7 orang tenaga Penyusun dan Perancang Undang-undang agar perda yang dibuat bernuansa HAM dan tidak menyimpang dari UU yang lebih tinggi. (Humas Kanwil Malut)



KABID INTELEDAKIM DILANTIK



S

etelah cukup lama terdapat kekosongan jabatan Kabid Intelejen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Maluku Utara maka pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 bertempat di Aula Kantor Wilayah telah dilaksanakan pelantikan Kabid Inteldakim atas nama Silvester Sili Laba, SH yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kupang Nusa Tenggara Timur.

Mengutip apa yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya bahwa mutasi atau pemindahan pegawai adalah suatu hal yang mutlak dan biasa terjadi dalam sebuah instansi. Hal ini dilakukan guna memberikan angin segar terhadap pegawai yang bersangkutan dalam bertugas supaya tidak terjadi kejenuhan, mengingat jika seorang pegawai telah lama menduduki suatu jabatan dan tidak dilakukan rolling atau mutasi maka akan terjadi kejenuhan sehingga memiliki efek yang kurang baik misalnya prestasinya stagnan atau bahkan mengalami penurunan. Selain itu mutasi juga dimaksudkan sebagai promosi atas jerih payah yang telah dilakukan oleh seorang pegawai atas prestasi kinerja yang

telah diraih sehingga dengan adanya promosi jabatan dapat membuat pegawai tersebut lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras, lebih keras, dan lebih keras lagi.

Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa jabatan Kabid Inteldakim ini sangat penting guna menjaga keutuhan NKRI. Kenapa seperti itu, mengingat Provinsi Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia Timur yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Filipina. Selain itu, wilayah Maluku Utara juga didominasi oleh lautan bebas yang daerah perairannya mencapai 70% dan berbatasan dengan negara-negara tetangga. Wilayah perairan inilah yang biasa digunakan oleh negara-negara asing untuk memasuki NKRI. Untuk itu setiap terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh WNA dengan memasuki NKRI melalui perairan Maluku Utara entah mereka bertujuan mencari ikan, dengan modus penelitian atau imigran yang ingin mencari suka tetap harus diwaspadai. Untuk itu, saya berharap kepada Kabid Intelejen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian untuk melakukan kerjasama dan berkoordinasi lebih intens kepada pihak terkait guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Humas Kanwil Malut)



SOSIALISASI HIV/AIDS DAN IMS

Banyak stigma yang beredar di masyarakat tentang betapa menakutkannya jika mendengar ada orang atau teman atau bahkan tetangga yang terkena HIV / AIDS. Beberapa orang beranggapan jika hidup serumah, makan dengan memakai alat memasak atau alat makan yang sama, tidur bersama, olahraga bersama kemudian saling senggolan kulit sehingga kena keringat dan masih banyak lagi makan kita akan tertular HIV / AIDS. Itulah paradigma yang berkembang dimasyarakat saat ini. Untuk itu, KPA – MU (Komisi Penanggulangan AIDS Maluku Utara) pada hari Rabu, 26 Nopember 2014 bertempat di Aula kantor Wilayah telah melaksanakan Sosialisasi HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual yang disampaikan oleh dr. Wirda dan Ibu Hj. Runi selaku sekretaris KPA Provinsi Maluku Utara.

Memang benar HIV/ AIDS itu bisa menular tetapi virus HIV ini hanya akan menular melalui 4 aspek yakni darah, Cairan Sperma, Cairan vagina dan ASI. Kalau hanya makan dengan menggunakan alat makan yang sama, olahraga bersama bersenggolan kulit dan terkena keringat, tidur bersama dalam arti tidak melakukan hubungan seksual tanpa kondom maka virus HIV tidak akan menular kepada orang lain. Bahkan virus Hepatitis bisa menjadi lebih berbahaya dari pada HIV / AIDS, karena virus ini bisa menyebar melalui udara, sehingga orang bisa lebih mudah tertular virus ini. Demikian beberapa point penting yang disampaikan oleh dr. Wirda pada saat sosialisasi HIV/AIDS & IMS kepada para pegawai di jajaran kantor

Wilayah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara.

Beliau menambahkan bahwa dengan berperilaku sehat dan tidak menyimpang seperti tidak melakukan hubungan seksual dengan berganti pasangan, berhubungan seksual dengan memakai kondom, tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian, tidak emnggunakan alat kecantikan seperti alat cukur secara bergantian, transfusi darah yang aman maka kita tidak akan terjangkit virus mematikan ini. Mengingat jika seseorang positif HIV maka selama hidup dia akan positif HIV. Untuk itu bagi ODHA (Orang Dengan Hidup HIV AIDS) maka seumur hidup dia harus minum obat Anti Retroviral guna mencegah virus HIV melakukan replika pada darah kita tambahnya.

Ibu Hj. Runi sendiri selaku Sekretaris KPA mengungkapkan bahwa kondisi penyandang Virus HIV di Maluku Utara sendiri sudah cukup mengkhawatirkan mengingat jumlah penduduk di Prov. Maluku Utara sekitar 1, 2 Juta jiwa, terus pengidap positif HIV AIDS sampai dengan April 2014 tercatat sebanyak 360 orang. Berdasarkan definisi WHO bahwa jika dalam suatu daerah terdapat 1 orang positif HIV maka terdapat 100 orang yang belum bisa teridentifikasi, maka jika di Maluku Utara yang mengidap Positif Virus HIV sebanyak 360 orang maka sebanyak 36.000 kasus yang belum teridentifikasi. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat untuk berperilaku sehat dan bersama-sama mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah HIV / AIDS di Maluku Utar. (Humas Kanwil Malut)



SELAYANG PANDANG

KANTOR IMIGRASI KLAS II TOBELO

Oleh:

*Novianto Sulastono, SH., MH
(Kepala Kantor Imigrasi Klas II Tobelo)*

Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2008

tanggal 09 Oktober 2008, dengan wilayah kerja meliputi

“Out Bond pada Kantor Imigrasi Klas II Tobelo sebagai proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kegiatan ini dikemas dalam terbuka guna meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia”

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Kepulauan Morotai yang berbatasan langsung dengan Negara Philipina dan Negara Kepulauan Palau.

Yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian secara efisien dan efektifitas di wilayah propinsi Maluku Utara dan wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Philipina dan Negara Kepulauan Palau.

Sebelum berdiri sendiri, wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo merupakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Ternate, namun seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Maluku Utara, terlebih untuk mengantisipasi masuknya warga Negara asing secara illegal karena wilayah Tobelo berbatasan langsung dengan Negara Philipina dan Negara Kepulauan Palau maka keberadaan kantor Imigrasi Tobelo diwilayah Kabupaten Halmahera utara sangat diperlukan.

Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo yang berada di Kota Tobelo berlokasi di Jalan Raya Terusan Galela/Kemakmuran, Desa Gorua Selatan-Tobelo-Halmahera Utara, berdekatan dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tobelo.

Kepala Kantor selalu berupaya dan berusaha meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia , peningkatan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan mensejajarkan diri dengan kantor Imigrasi yang lain.

OUT BOUND SARANA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berbicara tentang Out Bound maka yang langsung terbesit di pikiran kita adalah bentuk permainan yang dilakukan bersama kelompok, tertawa dan juga pastinya akan teringat pada permainan Flying Fox maupun Paint Ball.

Jika mindset tentang Out Bound adalah seperti itu, tidak dapat dipersalahkan, karena selama ini banyak sekali perusahaan/badan/individu yang mengadakan Out Bound Training tanpa tahu akan makna atau arti dari Out Bound itu sendiri.

Mengacu pada sejarah Out Bound di dunia, Dr. Hanh menggunakan nama Out Bound sebaga nama sekolahnya yang berdiri di Aber Dovey-Wales pada Tahun 1914, dimana sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk melatih fisik dan mental para pelaut muda guna menghadapi ganasnya pelayaran di Lautan Atlantik pada saat itu, dikarenakan Inggris terlibat dalam Perang Dunia II.

Dengan metode dan pendekatan outward bound banyak ahli pendidikan yang mengklasifikasikan bentuk pela-

hian ini sebagai Adventure Education atau Experiential Learning.

Out Bound adalah kegiatan luar ruang sebagai media pelatihan atau training yang didalamnya diberikan simulasi (bukan sekedar permainan) tetapi simulasi yang sarat akan pembelajaran tentang materi membangun personal (personal development) dan membangun team (team development) yang dikemas dalam program out bound training setelah melalui proses assesment terhadap kebutuhan akan program itu sendiri sehingga tepat sasaran (metode 3 tahap).

Jadi Out Bound adalah sebuah bentuk kegiatan yang inovatif sebagai pendekatan pembelajaran (Edukasi) dengan kreatifitas artistik serta berpetualang (adventure) di alam terbuka menjadi kemas utama untuk memenuhi kebutuhan dimana Integritas dan Kompetensi adalah hal yang utama.

KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO BEKERJA SAMA DENGAN BRIMOB KOMPI DETASEMEN A TOBELO MELAKUKAN KEGIATAN OUT BOUND DI PANTAI KUPA-KUPA-TOBELO.

Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo bekerja sama dengan Brimob Kompi Detasemen A Tobelo pada tanggal 29 Nopember 2014 melakukan kegiatan Out Bound di di pantai Kupa-Kupa Tobelo.



Kegiatan ini diikuti oleh seluruh personil yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo, diawali dengan berjalan kaki dari Kantor Imigrasi Klas II Tobelo menuju markas Komando Brimob Kompi Detasemen A Tobelo pukul 07.30 WIT, dengan lama perjalanan kurang lebih 1 jam. Setibanya di Mako Brimob dan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan berupa pembentukan tim /



kelompok dengan tujuan membangun dan membina hubungan kerjasama team (team work) agar solid dan kompak.

Setelah rangkaian kegiatan ini selesai, maka dilanjutkan kegiatan berjalan melintasi alam dari Markas Komando Brimob menuju Pantai Kupa-kupa Tobelo dengan jarak lintas kurang lebih 10 Km, meliputi jalan raya, hutan, sungai, perkebunan serta perkampungan penduduk. Dimana kegiatan ini adalah bentuk implementasi daripada latihan fisik dialam bebas.

“Fun Out Bond dan Team Building” adalah pelatihan dengan metode belajar dari pengalaman (experiential learning) untuk mengembangkan kemampuan personal,

managerial dan leadership dengan aktifitas dinamis dan tantangan-tantangan melalui media program games dialam terbuka.



Melalui kegiatan out bond ini diharapkan adanya manfaat bagi seluruh pegawai pada Kantor Imigrasi klas II Tobelo sehingga dapat meningkatkan kemampuan mengenal diri dan orang lain, melatih ketahanan mental dan pengendalian diri, melahirkan semangat kompetisi yang sehat, meningkatkan jiwa kepemimpinan, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, membangun rasa percaya diri dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dari manfaat tersebut diatas pada akhirnya akan dapat lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Salam mesra dari Bumi Hibualamo - Tobelo Marahai (Rumah Besar di Tobelo yang aman, tenteram dan damai).



PERINGATAN HARI AIDS SEDUNIA TAHUN 2014

RIBUAN ORANG IKUT MEMERIAHKAN

DENGAN JALAN SANTAI

Dalam rangka menyambut Hari AIDS Sedunia Tahun 2014 yang jatuh pada 1 Desember maka Komisi Penanggulangan AIDS Maluku Utara (KPA – MU) menyelenggarakan berbagai macam kegiatan diantaranya, Seminar Sehari tentang HIV / AIDS di Bella International Hotel Ternate, Sosialisasi HIV/ AIDS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, Bhakti Sosial dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pemeriksaan HIV Gratis, Live Streaming di RRI Tentang HIV // AIDS, Sosialisasi HIV / AIDS pada Pelajar dan Masyarakat, Pembagian Stiker dan Leaflet, Jalan Santai dan puncaknya adalah Upacara dalam Rangka HIV AIDS yang dilaksanakan di Lembaga Pemasayarakatan Klas IIA Ternate sekaligus VCT Gratis kepada Warga Binaan Pemasayarakatan.

Jalan santai yang dilaksanakan pada Minggu, 30 Nopember 2014 dengan star di taman Nukila Ternate yang dilepas oleh Kakanwil Kemenkumham Maluku Utara Drs. Agus Rawan, SH., MM., M.Si tersebut diikuti oleh para pegawai SKPD Anggota KPA – MU, Pelajar dan Mahasiswa serta masyarakat secara umum. Walaupun pada saat pelaksanaan jalan santai cuaca kurang bagus disertai dengan hujan rintik-rintik namun antusiasme peserta san-

gat tinggi, hal ini terbukti dengan membludaknya peserta jalan santai.

Setelah jalan santai peserta diajak untuk melakukan senam bersama dan dilanjutkan dengan pembagian doorprize. Kakanwil menyampaikan pesan bahwa jangan mendiskriminasi masyarakat yang terkena HIV / AIDS karena meraka adalah sama dimata tuhan dan tidak berbeda dengan kita semua. Untuk itu beri semangat, dorongan dan motivasi kepada mereka bukan dengan mendiskriminasi. Setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum. Jauhi penyakitnya, jangan jauhi orangnya. (Humas Kanwil Malut)





PEMANFAATAN DESAIN INDUSTRI BAGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI MALUKU UTARA

Oleh:

Kasim Umasangadji, SH., MH

(Kepala Sub. Bidang Pelayanan AHU dan HKI Kanwil Kemenkumham Maluku)

U

MKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pada intinya istilah ini merujuk kepada usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan orang perorang dan atau badan usaha perorangan

untuk usaha mikro atau badan usaha dengan kriteria masing-masing. Adapun menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro Kecil dan Menengah, perbedaan kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah didasarkan pada nilai kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Mengapa UMKM Penting?

Tidak dapat disangkal potensi UMKM sangat besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat Provinsi Maluku Utara sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Sayangnya pembagian sektor ekonomi atau sektor usaha pada dasarnya tidak dapat menunjukkan sektor industri kreatif yang erat kaitannya dengan desain industri, namun menurut kacamata masyarakat bawah, dapatlah dikatakan bahwa UMKM di Maluku Utara cukup banyak yang berbasis Industri rumahan, misalnya produk mebel, cendra mata, batik khas Ternate dan sebagainya, cukup banyak pula media massa yang mengangkat tentang UMKM yang berkembang dengan mendasarkan pada desain industri, terlepas apakah desain industri itu terdaftar atau tidak. Bahkan telah ada desain industri

dari UMKM Maluku Utara, yaitu desain batik Ternate Tubo, desain batik Ternate Tobenga, dan beberapa diantaranya sudah memiliki cabang serta penghasilan yang cukup baik, tetapi belum terdaftar. Hal ini dapat dijadikan contoh mengenai sangat pentingnya desain industri dalam pengembangan usaha walaupun Desain Industri tersebut belum terdaftar.

Desain industri sendiri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Di luar pengertian resmi secara umum desain industri mengacu pada bentuk luar dan fungsi produk secara keseluruhan, namun dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, desain Industri hanya mengacu kepada aspek ornamental dan estetika dari suatu produk.

Dengan kata lain, desain industri hanya mengacu kepada tampilan (bentuk luar) suatu produk, jadi desain industri sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual hanya mengacu kepada nilai estetika dari produk yang sudah jadi, dan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek teknis dan fungsionalnya.



Pendaftaran Desain Industri oleh UMKM suatu kenyataan

Dalam Undang-undang UMKM, diatur mengenai aspek promosi dagang yang ditujukan untuk diantaranya, memfasilitasi pemilikan hak atas Kekayaan Intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam kegiatan usaha. Itulah sebabnya dapat kita lihat selama tiga belas tahun Kantor Wilayah berada di Provinsi Maluku Utara hanya satu UMKM yang mendaftar, apabila kita lihat kebelakang tidak sebanding jumlah pemohon dengan jumlah UMKM yang berada di Provinsi Maluku Utara.

DESTINASI WISATA KOTA TERNATE

Indonesia terkenal dengan sejuta keindahan alam yang memukau semua orang di seluruh dunia, dan salah satunya adalah banyaknya pulau dan pantai yang memiliki kecantikan eksotis di Indonesia, di sisi lain ada beberapa pantai Indonesia yang mendunia berkat keindahan dan berbagai pesona yang di tawarkannya salah satunya adalah Bali.

Namun tahukah anda, bahwa Maluku Utara juga memiliki keindahan alam yang tidak kalah dengan daerah lain...?

Masyarakat Maluku Utara patut berbangga diri karena salah satu pesona alam yang ada, telah ditetapkan oleh pemerintah dengan mematrikannya Pulau Tidore dan Maitara pada selembaer uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Pemilihan gambar oleh pemerintah untuk ditetapkan pada mata uang bukanlah sebuah perkara mudah, mengingat hal ini membutuhkan waktu dan seleksi yang ketat sampai ditetapkannya sebuah gambar dalam mata uang.



Selain itu, objek wisata di Kota Ternate yang bisa menjadi referensi adalah wisata batu Angus yakni sisa dari tumpahan vulkanologi dari gunung Gamalama.



Bagi anda yang mempunyai hobi untuk menyelam dan ingin melihat keindahan bawah laut, maka kunjungilah Pantai Sulamadaha.



Selain objek wisata diatas, yang wajib anda kunjungi adalah Danau Tolire, Benteng Kalamata, Benteng Toloko, Benteng Fort Oranje.





SOSIALISASI HIV/AIDS & IMS
LINGKUP KANWIL KEMENTERIAN KESEHATAN DAN FARMASI PROVINSI MALU
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI AIDS SEDUNIA 1 DESEMBER

Cerah dan lindungi diri, keluarga, masyarakat dari HIV dan AIDS dalam rangka perlindungan

Ternate, 1 Desember 2014

